

MEMAKNAI FILM DIRTY VOTE SEBAGAI PARRHESIA MICHEL FOUCAULT

Oktavianus Baylon¹, Epifanius Agung², Daniel Oktaviano Syukur³, Saverinus Panjo⁴,
Kristian Panusi Gombol⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, NTT

Email : ovanbaylon@gmail.com

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Received :05-04-2025

Revised :26-05-2025

Accepted :01-06-2025

Keywords: Dirty Vote,
Parrhesia, Truth, and
Democracy.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to reinterpret the Dirty Vote film as Michel Foucault's act of parrhesia (telling the truth). This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The author collects various literature such as books, journals, and articles in books that are relevant to the research topic. The various literatures are then processed, analyzed, reviewed, and interpreted to be further elaborated in this study. The results of this study show that the Dirty Vote film is actually a film that tells the truth regarding the fraud in the 2024 Election. Therefore, this film can be interpreted as Foucault's parrhesia. This claim is based on the fact that the substance of this film actually reflects four elements of parrhesia, namely, parrhesia is associated with freedom of speech, parrhesia is always associated with truth, parrhesia in relation to danger and parrhesia is associated with duties and obligations. As parrhesia, this film is an attempt to re-establish the truth that has been monopolized by the regime. More than that, this film is seen as a critical voice that is useful for the growth of democracy in Indonesia, at least criticizing the authorities so that they do not act arbitrarily.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai kembali film Dirty Vote sebagai tindakan parrhesia (menceritakan kebenaran) Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel dalam buku yang

relevan dengan topik penelitian. Berbagai literatur tersebut kemudian diolah, dianalisis, ditelaah, dan diinterpretasi untuk dielaborasi lebih lanjut dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film *Dirty Vote* sesungguhnya sebuah film yang menuturkan kebenaran terkait kecurangan Pemilu 2024. Karena itu, film ini dapat dimaknai sebagai parrhesia Foucault. Klaim ini didasari atas fakta bahwa substansi film ini sesungguhnya mencerminkan empat unsur parrhesia, yakni, parrhesia dihubungkan dengan kebebasan berbicara, parrhesia selalu dihubungkan dengan kebenaran, parrhesia dalam hubungan dengan bahaya dan parrhesia dihubungkan dengan tugas dan kewajiban. Sebagai parrhesia, film ini merupakan suatu ikhtiar untuk menegakkan kembali kebenaran yang selama ini dimonopoli oleh rezim. Lebih dari itu, film ini dilihat sebagai suara kritis yang bermanfaat bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia, setidaknya mengecam penguasa agar tidak berbuat sewenang-sewenang.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Februari 2024, lebih tepatnya tiga hari sebelum Indonesia melaksanakan perhelatan Pemilu (Pilpres dan Pileg), publik dihebohkan dengan sebuah film dokumenter berjudul *Dirty Vote*. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini mengundang publik untuk menelisik lebih dalam terkait apa sebenarnya yang dinarasikannya. Begitu ditonton secara cermat film ini ternyata menyingkap desain kecurangan pada masa sebelum Pemilu yang dilakukan elite politik di bawah payung pemerintahan Presiden Jokowi. Menariknya, film ini dirilis saat masa tenang sehingga sekurang-kurangnya dapat menjadi preferensi publik dalam menentukan siapa Presiden yang harus dipilih. Namun, sayangnya film ini, sebagian publik menganggap tidak penting sehingga tidak lagi menjadi acuan dalam memilih pemimpin. Hal ini disebabkan masih ada pihak yang menganggap film ini sebagai narasi provokatif dan upaya dari partisan tertentu yang ingin menjatuhkan kandidat lain.

Menurut penulis, film *Dirty Vote* bukanlah tuduhan provokatif atau upaya dari partisan yang mau menjatuhkan calon tertentu. Film ini merupakan bentuk suara kritis yang mengungkapkan fakta yang terjadi sebenarnya, bukan karangan atau propaganda yang mengada-ada. Film ini harus dianggap sebagai suara kritis dan seruan moral yang serupa dengan aksi beberapa kampus, organisasi masyarakat sipil dan kritikus lainnya yang sangat militan mengkritisi pemerintahan Jokowi. Jika ditelusuri dari substansinya, film ini tidak lain adalah sebuah film yang berupaya menyingkapkan kebenaran atas kecurangan Pemilu 2024. Kebenaran yang selama ini terkubur akibat dimonopoli oleh kekuasaan. Inilah yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, di mana demokrasi terpisah jauh dari kebenaran.

Demokrasi sekarang ditandai dengan era krisis kebenaran, di mana kebenaran menjadi barang mahal yang sulit diraih secara publik karena kebenaran kerap kali

dimanipulasi dan dimonopoli oleh kekuasaan. Bahkan kebenaran menjadi milik segelintir elite politik. Padahal, demokrasi mengandaikan adanya pluralitas kebenaran untuk mencegah tendensi monopoli legitimasi kebenaran yang berujung pada totalitarianisme rezim (Madung, 2021). Pluralitas kebenaran ini dapat kita baca pada kenyataan bahwa terjadi pertarungan klaim kebenaran antara elit politik dan masyarakat sipil. Pertarungan kebenaran mengandaikan, rezim tidak boleh memonopoli klaim kebenaran. Karena itu, segala bentuk kritik dan protes masyarakat sipil terhadap kekuasaan, termasuk melalui film *Dirty Vote* tidak lain adalah cara untuk melegitimasi kebenaran.

Perjuangan dalam menuturkan kebenaran membutuhkan keberanian, kejujuran, kebebasan, dan terbuka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sikap-sikap seperti inilah yang telah terjadi dalam film peluncuran *Dirty Vote*. Dengan munculnya film tersebut menjadi tanda betapa kebenaran amat penting ditegakkan. Upaya mengungkapkan kebenaran dalam film *Dirty Vote* sesungguhnya telah lama digambarkan Michel Foucault sebagai parrhesia. Parrhesia secara sederhana diartikan sebagai "menuturkan kebenaran" -*truth-telling* (Kebung, 2017). Foucault membangun konsep parrhesia terbagi ke dalam beberapa unsur makna antara lain: *parrhesia* dihubungkan dengan kebebasan berbicara, *parrhesia* selalu dihubungkan dengan kebenaran, *parrhesia* dalam hubungan dengan bahaya dan *parrhesia* dihubungkan dengan tugas dan kewajiban (Kebung, 1997).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memaknai kembali film *Dirty Vote* sebagai parrhesia Michael Foucault. Penulis akan mengelaborasi pandangan parrhesia Foucault dengan film *Dirty Vote* dengan berdasarkan pada empat unsur parrhesia tadi. Oleh karena itu, tulisan ini dibangun dengan sistematika berikut. Penulis pertama-tama menjelaskan sekilas tentang substansi film *Dirty Vote* yang meliputi: siapa saja yang menjadi pemeran utama, bagaimana film itu dibangun dan apa yang dinarasikan di dalamnya. Penulis kemudian menjelaskan sekilas riwayat hidup Michel Foucault dan pemikirannya tentang parrhesia. Selanjutnya yang menjadi inti pembahasan, penulis akan menguhubungkan di mana letak klaim film *Dirty Vote* sebagai tindakan parrhesia Foucault. Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin membangun kesadaran publik bahwa kebenaran yang diungkapkan dalam film *Dirty Vote* sungguh merupakan sumbangsih berharga bagi demokrasi, di mana kebenaran betapa penting ditegakkan agar para elit politik tidak bertendensi memonopoli dan memanipulasi kebenaran. Dengan memahami ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang keterhubungan film *Dirty Vote* dan parrhesia sebagai upaya menceritakan kebenaran. Tulisan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kesadaran publik agar pentingnya memperjuangkan kebenaran demi pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dalam menempuh metode ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel dalam buku yang relevan dengan topik penelitian.

Berbagai literatur tersebut kemudian diolah, dianalisis, ditelaah, dan diinterpretasi untuk dielaborasi lebih lanjut dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Film *Dirty Vote*

Di tengah masa tenang menjelang Pemilu 2024, publik Indonesia dihebohkan dengan film dokumenter berjudul *Dirty Vote* yang mengungkapkan desain kecurangan Pemilu 2024. Film ini dirilis pada 11 Februari 2024 di beberapa akun Youtube, seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan *Dirty Vote*. Film ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis investigasi yang sudah sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui film. *Dirty Vote* bukanlah film pertama Dandhy yang dibuat dalam momentum Pemilu. Sebelumnya, Dandhy juga meluncurkan film *Sexy Killers* menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 (Budiarti, 2024).

Film ini sebagaimana diterangkan oleh Dandhy di berbagai media, didasari mulai dari proses riset yang mendalam, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Dia menambahkan, pembuatan film ini berdasarkan kolaborasi 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YLBHI, Bangsa Mahardika, JATAM, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia *Corruption Watch*, Lokataru, LBH Pers, WALHI, dan Yayasan Kurawal (Betalia, 2024).

Film ini cukup menghebohkan publik karena isinya menyingkapkan secara getol desain kecurangan Pemilu 2024. Sebagaimana yang dirilis di dalam akun *Youtube* bernama *Dirty Vote*, tiga ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari sebagai pemeran utama mengungkapkan kecurangan Pemilu 2024 secara kronologis. Secara kronologis, film ini mengungkapkan kecurangan antara lain, penunjukkan 20 pejabat Gubernur dan 82 pejabat Walikota/Bupati oleh Presiden Jokowi yang cacat secara prosedural, pelanggaran keputusan MK dalam penunjukan kepala daerah, relasi pejabat Gubernur dengan Presiden, kecenderungan tidak netral pejabat Gubernur dan Bupati, kewenangan pejabat kepala daerah melarang kampanye, kontroversi deklarasi desa bersatu untuk paslon tertentu, politisasi kasus penyelewengan dana desa, tekanan kepada kepala desa untuk mendukung paslon tertentu, gaji ASN, Polri, dan pensiunan PNS naik di 2024, pengabaian data kementerian sosial dalam penyaluran bansos, bansos digunakan sebagai alat politik, Presiden tidak netral, Presiden dan menteri-menteri di pihak koalisi 02, Bawaslu dan KPU tidak profesional, dugaan pelanggaran KPU, hubungan putusan MK dan pelanggaran KPU, hingga kontroversi putusan MK. Dengan melihat kronologinya, sangat jelas bahwa film *Dirty Vote* mau menerangkan bahwa kecurangan Pemilu 2024 sebenarnya telah didesain sejauh-jauh hari dan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dari berbagai lembaga dan badan hukum negara.

Tidak lama setelah dirilis, film ini sontak menuai kontroversi, ada pihak pro dan kontra yang kemudian ramai diperbincangkan di berbagai media. Pihak pro dan kontra ini salah satunya datang dari para tim pendukung masing-masing ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pihak pro menyebut film ini sebagai bagian dari

pendidikan politik dan penting untuk dijadikan sebagai preferensi dalam memilih paslon. Deputy Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis misalnya, menilai penayangan film ini sangat positif karena mengungkapkan praktik-praktik kecurangan Pemilu 2024 (Betalia, 2024).

Senada dengan tim pendukung Ganjar-Mahfud, Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin Iwan Tarigan, juga menilai film *Dirty Vote* sebagai pendidikan politik bagi masyarakat karena terungkapnya kerja kotor politisi yang telah memperlakukan publik hanya untuk kepentingan golongan mereka (Hakim, 2024). Sementara itu, dari pihak kontra mengklaim film ini sebagai bentuk tuduhan dan dianggap sebagai upaya dari partisiian calon tertentu untuk menjatuhkan calon lain. Pihak kontra ini lebih didominasi oleh tim pendukung pasangan calon 02, Prabowo-Gibran. Wakil ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman misalnya, menuduh film tersebut berisi fitnah dan tidak ilmiah (Hakim, 2024).

Di tengah kontroversial tersebut, penulis sampai pada pendirian bahwa film *Dirty Vote* merupakan film yang berbasis data yang selama ini hanya dikemas dalam bentuk dokumen kemudian dinarasikan dalam bentuk film sehingga tidak perlu lagi mengkritisnya sebagai propaganda atau rekayasa. Hal ini cukup beralasan sebagaimana diterangkan oleh Laksono sendiri sebagai sutradara yang mengatakan bahwa film ini dibuat berdasarkan riset yang mendalam dengan melibatkan beberapa lembaga independen. Dengan demikian, film ini bukanlah provokatif atau tuduhan. Film ini juga sangat menarik dan mengedukasi ketika penonton mencermatinya dengan cermat. Film ini penting sebagai pendidikan politik yang mencerahkan masyarakat agar memilih pemimpin secara bijak. Melalui film ini juga, semua kecurangan yang dilakukan elite politik tersingkap.

Michel Foucault dan Pemikirannya tentang Parrhesia

Michel Foucault barangkali seorang filsuf yang kurang terkenal, sehingga amat perlu bagian ini pertama-tama akan memperkenalkan riwayat hidupnya. Michel Foucault lahir dengan nama lengkap Paul Michel Foucault pada tahun 1926 di Poitiers, Perancis barat. Ayah Foucault bernama, Paul-Andre Foucault, seorang ahli bedah terkemuka dan ibunya bernama Anne, juga putri seorang ahli bedah (Kelly, 2010).

Foucault sebagai salah seorang filsuf terkemuka abad ke-20 memiliki nama besar dalam dunia filsafat. Foucault selalu disandingkan dengan filsuf eksistensialis atheis Perancis, Jean-Paul Sartre (1905-1980). Sebagai pemikir dunia yang terkenal, Foucault menghasilkan banyak karya tulis (Kebung, 2018). Selain itu, Foucault terkenal karena memiliki kekayaan pengetahuan yang luar biasa luas sehingga banyak julukan diberikan kepadanya, mulai dari seorang filsuf, sejarawan, budayawan, psikolog, ahli linguistik, dan sosiolog (Kebung, 2017).

Salah satu pemikiran filosofis Foucault yang masih relevan dengan dinamika demokrasi modern saat ini ialah konsepnya mengenai *parrhesia*. Foucault memperkenalkan istilah *parrhesia* dalam seminar terakhirnya di Universitas California di Berkeley, pada tahun 1983. Seminar ini kemudian dibukukan oleh Joseph Pearson dalam "Discourse and Truth: The Problematization of Parrhesia" (Kebung, 2018).

Penting dicatat bahwa *parrhesia* yang diperkenalkan Foucault mengandung arti etimologis. Kata *parrhesia* berasal dari kata bahasa Yunani “pan” yang berarti “semua” dan “rhesis” atau “rhema” yang berarti “ekspresi”, “apa yang dikatakan”, “pidato atau perkataan”. Berdasarkan asal usul katanya, *parrhesia* berarti mengatakan segala sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang. Kata ini juga dimaknai sebagai keterampilan dan kebebasan dalam berbicara, keterbukaan, dan keterus-terangan (Kebung, 2018). Dalam Bahasa Yunani, *parrhesia* mengandung tiga bentuk pengungkapan, yaitu bentuk nominal yang berarti menceritakan kebenaran dan berbicara secara jujur, bentuk verba *parrhesiazomai* atau *parrhesiazesthai* yang berarti menggunakan *parrhesia*, dan *parrhesiastes* (orang yang berbicara tentang kebenaran) (Kebung, 2018). Secara umum, *parrhesia* dipahami sebagai kebebasan, keterbukaan, dan keterampilan *parrhesiast* (orang yang berbicara tentang kebenaran) untuk mengungkapkan kebenaran.

Lebih dari arti etimologis, Foucault memaknai *parrhesia* ke dalam beberapa unsur makna. *Pertama*, *parrhesia* berarti kebebasan berbicara, yakni keterus-terangan atau kebebasan mengatakan segala sesuatu yang ada dalam pikiran seorang *parrhesiast* (Kebung, 1997). *Parrhesiast* mengatakan segala sesuatu berdasarkan apa yang dipikirkannya. Seorang *parrhesiast* tidak menyembunyikan apa pun, tetapi memberikan pikirannya sepenuhnya kepada orang lain melalui wacananya (Foucault, 2018). Dalam suatu wacana, seorang *parrhesiast* mengungkapkan sesuatu dengan tidak bimbang karena ia yakin bahwa apa yang dipikirkannya amat perlu diungkapkan.

Kedua, *parrhesia* selalu dihubungkan dengan kebenaran, yakni berbicara atau mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran berarti mengatakan apa yang benar karena si subyek tahu bahwa apa yang ia katakan adalah benar (Kebung, 1997). Dengan kata lain, apa yang diungkapkan *parrhesiast* tidak lain adalah kebenaran. *Parrhesiast* di sini identik dengan kebenaran. *Parrhesiast* adalah subyek kebenaran itu sendiri sehingga apa yang diungkapkan selalu mengandaikan ada unsur kebenaran. Bagi Foucault, *parrhesiastes* mengatakan apa yang benar karena ia sadar bahwa hal itu memang benar. Setiap pendapat yang ditanyakan pihak *parrhesiastes* mengandung kebenaran, di mana ia tidak sekadar mengeluarkan pendapatnya. (Foucault, 2018).

Ketiga, *parrhesia* dan bahaya. Foucault berpandangan bahwa pihak *parrhesiast* selalu berhadapan dengan bahaya ketika mengatakan kebenaran. Karena itu, *parrhesiastes* harus berani (Kebung, 1997). Dengan demikian, *parrhesia* berkaitan erat dengan keberanian untuk menghadapi bahaya. *Parrhesia* mengandaikan keberanian untuk berbicara benar kendati dibayangi berbagai bahaya. Menyatakan kebenaran adalah suatu “permainan” hidup-mati (Foucault, 2018). *Parrhesiastes* sejati adalah seorang yang berani mengungkapkan kebenaran di hadapan risiko. Dalam dunia politik, warga negara hanya bisa diklaim sebagai *parrhesiast* kalau ia berani menuturkan kebenaran di hadapan otoritas sekalipun otoritas tersebut sangat bengis dan diktator.

Keempat, *parrhesia* dalam hubungan dengan tugas dan kewajiban. *Parrhesia* dilihat sebagai tugas dan kewajiban. Mengatakan kebenaran merupakan suatu tugas dan kebajikan dan sungguh berdasar pada kesadaran akan tugas seorang *parrhesiastes*. Pihak *parrhesiast* tidak pernah merasa dipaksa untuk menceritakan kebenaran. (Kebung, 2018).

Menuturkan kebenaran sungguh merupakan berasal dari kesadaran moral pihak parrhesiast sehingga tidak didasarkan atas pemaksaan dari otoritas di luar dirinya. Pihak parrhesiastes harus sadar bahwa mengatakan kebenaran dilihat sebagai tugas dan kewajiban. Dalam demokrasi, perjuangan seorang parrhesiast ini dapat dilihat dari misalnya, mengontrol dan mengecek penguasa yang tidak menjalankan roda kekuasaannya berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Tentang ini, Foucault menyatakan bahwa mengecek penguasa dapat dikatakan sebagai parrhesia karena itu merupakan kewajiban kepada *polis* (negara) untuk membantu penguasa agar bertindak lebih baik (Foucault, 2018)

Berdasarkan definisi dan beberapa maknanya, maka dapat disimpulkan bahwa parrhesia juga sangat mungkin berlaku dan berfungsi untuk demokrasi. Sebab, demokrasi membutuhkan parrhesia agar kekuasaan tidak sewenang-wenang memonopoli kebenaran. Hadirnya tindakan parrhesia dalam demokrasi setidaknya mencegah keabsolutan kekuasaan dalam memonopoli kebenaran. Di Indonesia, tindakan parrhesia dapat dibaca pada film *Dirty Vote* yang akhir-akhir ini masih diperbincangkan publik terkait substansinya. Menariknya film ini paralel dengan parrhesia Foucault jika dilihat secara substansinya yang memuat kebenaran. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang tautan film *Dirty Vote* dengan parrhesia Foucault.

Film *Dirty Vote* sebagai Parrhesia Foucault

Dalam memaknai film *Dirty Vote* sebagai parrhesia, penulis mengacu pada empat makna atau arti parrhesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, keempat makna ini akan digunakan sebagai landasan dalam memahami film *Dirty Vote* sebagai tindakan parrhesia.

Pertama, parrhesia dalam hubungan dengan kebebasan berbicara. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa parrhesia dihubungkan dengan kepolosan mengatakan segala sesuatu yang ada dalam pikiran seorang parrhesiast. Parrhesiast mengatakan segala sesuatu berdasarkan apa yang ia pikirkan, ia tidak menyembunyikan apa pun saat mengungkapkan kebenaran. Kebenaran diungkapkan secara terus terang dan bebas. Oleh karena itu, narasi yang diungkapkan film *Dirty Vote* tidak serta merta propaganda, tetapi kebenaran yang diungkapkan secara sistematis dan kronologis berdasarkan keyakinan penuh dari para aktor bahwa memang ada unsur kebenaran yang diungkapkan film tersebut. Sebab, sangat jelas film ini mementaskan desain kecurangan Pemilu 2024 dengan terang-terangan, tanpa ada keraguan sedikit pun atau menutupi sisi tertentu. Bahkan, kecurangan yang paling ekstrem sekalipun diungkapkan secara eksplisit dalam film ini. Film *Dirty Vote* kalau diinterpretasi secara politis merupakan representasi dari salah satu prinsip demokrasi, yakni kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara juga telah dijamin secara konstitusional. Hal ini sangat jelas termuat dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Kedua, parrhesia selalu dihubungkan dengan kebenaran. Jika dalam parrhesia seorang penutur kebenaran punya relasi dengan kebenaran atau karena memang apa yang diungkapkannya itu adalah kebenaran, maka film *Dirty Vote* harus dipahami

demikian. Film *Dirty Vote* adalah kebenaran itu sendiri. Film ini bukan semacam film rekayasa yang penuh fiksi, melainkan sebuah narasi kritis yang bermuatan fakta dan kebenaran. Melalui riset yang mendalam dengan dukungan beberapa lembaga independen, film ini dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, film ini bukan narasi yang penuh propaganda, melainkan narasi yang mengungkapkan semua kecurangan pada masa sebelum Pemilu 2024. Hal ini sangat jelas ketika film menuturkan secara gamblang semua kecurangan beberapa elite politik di bawah pemerintahan presiden Jokowi.

Ketiga, parrhesia dan bahaya. Telah dijelaskan bahwa parrhesia selalu berhadapan dengan risiko atau bahaya. Karena itu dibutuhkan sikap berani dari parrhesiast. Bahaya yang dihadapi oleh aktor film *Dirty Vote* adalah kemarahan sebagian publik yang tidak menerima film ini dan tindakan intimidasi dari penguasa yang merupakan sasaran kritik. Meski bahaya menimpa mereka, para aktor film justru mengungkapkan kecurangan pemerintahan presiden Jokowi secara militan dengan membangun narasi-narasi kritis yang tajam. Hal ini merupakan manifestasi keberanian yang pada dasarnya bertujuan mengecam elite politik. Keberanian yang luar biasa di tengah menguatnya intervensi dan intimidasi kekuasaan.

Terakhir, parrhesia dalam hubungan dengan tugas dan kewajiban. Film *Dirty Vote* harus dipahami sebagai sebuah upaya mengungkapkan kebenaran yang bukan karena atas campur tangan dari otoritas tertentu, melainkan karena para pelaku film tersebut memang sadar akan tugas dan kewajiban sebagai warga negara yang memperjuangkan kebenaran. Aktor dan sutradara film ini merupakan orang-orang yang tidak berafiliasi dengan kekuasaan, tetapi warga negara, akademisi, praktisi hukum, dan jurnalis yang selama ini dikenal getol mengkritisi pemerintah. Selain itu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam merilis film ini juga bukan perpanjangan tangan dari kekuasaan, melainkan lembaga-lembaga independen yang selama ini selalu mengkritik kekuasaan dan berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, tuduhan yang dilontarkan oleh segelintir pihak yang mengklaim film ini sebagai bagian dari partisan atau suatu bentuk penghinaan terhadap calon tertentu merupakan tuduhan tidak benar.

Film tersebut sangat eksplisit tidak bermaksud untuk berkampanye atau menggunakan pernyataan persuasif seperti dalam retorika, di mana tujuannya adalah mengajak pendengar untuk memilih calon tertentu. Foucault juga termasuk dalam pernyataan terakhir ini, yakni ia tidak memahami parrhesia dalam hubungan dengan retorika. Foucault sampai pada kesadaran bahwa parrhesia sungguh berbeda dari retorika (Wada, 2019). Argumentasinya jelas bahwa retorika lebih banyak menggunakan bahasa persuasif untuk meyakinkan orang lain hanya demi mementingkan diri sendiri dan kepentingan segelintir orang. Hal ini sebagaimana dalam sejarah pemikiran filosofis, retorika sempat diidentikan dengan aktivitas kaum sophis, bukan tugas seorang filosof, sebab retorika dipakai untuk melayani kepentingan pribadi (Wada, 2019). Karena itu, film *Dirty Vote* harus jauh dari anggapan sebagai film retorik. Film ini lebih jauh manfaatnya yakni menguntungkan masyarakat banyak, di mana mereka mendapat pengetahuan secara intens bahwa kecurangan Pemilu memang ada dan demokrasi tidak

sedang baik-baik saja. Dengan demikian, tidak ada relasi khusus antara kebenaran yang diungkapkan Dirty Vote dengan kepentingan kekuasaan. Tidak ada otoritas yang memerintahkan supaya film ini dirilis. Film ini dicetuskan mutlak berdasarkan kesadaran moral warga negara karena prihatin dengan kondisi demokrasi yang mengalami degradasi akibat kecurangan elit politik.

Dirty Vote dan Parrhesia: Manfaatnya di Tengah Anomali Kebenaran

Harus kita akui bahwa Indonesia hari-hari ini dilanda dengan krisis kebenaran sebagai akibat dari monopoli dan manipulasi kebenaran oleh rezim. Rezim misalnya, mengerahkan *buzzer* untuk meredam dan menangkis suara kritis publik. Pengerahan *buzzer* politik seolah memperkuat klaim bahwa kebenaran hanya dimiliki oleh rezim. Opini publik sering kali dianggap mengganggu sehingga mesti dipermainkan, dipropaganda, bahkan dilenyapkan secara massif. Akibatnya, peran warga negara dalam melegitimasi kebenaran juga sering kali diabaikan. Penguasa cenderung bersikap sewenang-wenang, di mana kecurangan yang dilakukannya selalu diklaim sebagai yang benar, padahal kenyataannya melanggar hukum dan moral bangsa. Padahal, demokrasi memungkinkan terjadinya ruang diskursus, yakni semua warga negara dilibatkan dalam urusan politik termasuk untuk menegakkan kebenaran. Demokrasi tentu tidak sama dengan sistem atau rezim totalitarian, yakni tidak terdapat deliberasi tentang kebenaran. Yang ada hanyalah monopoli atas kebenaran yang berpijak di atas dogma "*the king can do no wrong*" (Madung, 2021).

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, konsekuensinya ialah budaya deliberasi menjadi keniscayaan sehingga tidak perlu dimusnahkan. Dengan adanya budaya deliberasi, maka roda pemerintahan bersifat inklusif, yakni para elit politik/pemerintah terus terbuka terhadap kritik warga negara. Hal ini sepadan dengan pemikiran filsafat politik Karl Popper tentang *masyarakat terbuka* yang dituangkan dalam bukunya berjudul *The Open Society and Its Enemies* (1950) dengan terjemahan Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan (Fauzan, 2002). *Masyarakat terbuka* yang dimaksudkan Popper dalam buku ini, kalau ditafsir secara politik mau menunjukkan bahwa tidak ada kebenaran absolut dalam demokrasi. *Masyarakat terbuka* mau menegaskan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh otoritas yang harus ditunduk oleh warga negara, tetapi kebenaran selalu terbuka untuk dikritik.

Rilisnya film Dirty Vote sebagai parrhesia menjadi angin segar bagi demokrasi di Indonesia yang hari-hari ini penuh manipulasi kebenaran oleh rezim politik. Akhirnya, baik film Dirty Vote maupun parrhesia sama-sama penting dalam demokrasi, setidaknya untuk mencegah penguasa agar tidak memonopoli kebenaran. Film Dirty Vote dan parrhesia merupakan sumbangsih berharga bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sebagai parrhesia, film ini merupakan suatu seruan kritik dan sangat penting bagi iklim demokrasi. Kebenaran yang diungkapkan dalam film ini hadir di tengah monopoli dan manipulasi kebenaran dengan berbagai praktik kecurangan yang dilakukan elit politik. Berbagai praktik kecurangan disingkap secara kronologis dan sistematis dalam film ini.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Tulisan ini telah menunjukkan, film *Dirty Vote* dimaknai sebagai parrhesia Michel Foucault. Parrhesia diartikan sebagai “menuturkan kebenaran”. Klaim film *Dirty Vote* sebagai parrhesia didasari pada fakta bahwa substansi film ini sesungguhnya mencerminkan empat unsur parrhesia, yakni, parrhesia dihubungkan dengan kebebasan berbicara, parrhesia selalu dihubungkan dengan kebenaran, parrhesia dalam hubungan dengan bahaya dan parrhesia dihubungkan dengan tugas dan kewajiban. Sebagai parrhesia, film ini merupakan suatu ikhtiar untuk menegakkan kembali kebenaran yang selama ini dimonopoli oleh rezim. Dengan data yang kuat, film ini membongkar kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan presiden Jokowi bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah lain. Bagi penulis, film ini mesti dilihat sebagai bentuk narasi kritis yang berupaya menyingkapkan kebenaran di balik kecurangan pemerintahan Jokowi. Narasi kritis tentu bukanlah bersifat fiksi yang penuh propaganda, melainkan narasi yang berdasarkan fakta melalui riset dari para aktornya, ditambah lagi basis narasinya berlandaskan hukum. Film ini merupakan suatu seruan kritik dan sangat penting untuk mendorong demokratisasi, di mana kebenaran harus diperjuangkan, setidaknya untuk mencegah penguasa agar tidak memonopoli kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Betalia, Vonita. (2024, Februari, 11). *Film ‘Dirty Vote’ Bongkar Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud: Pendidikan Politik yang Bagus*. Inilah.com. <https://www.inilah.com/film-dirty-vote-bongkar-kecurangan-pemilu-2024-tpn-ganjar-mahfud-pendidikan-politik-yang-bagus>.
- Budiarti, Irma. (2024, Februari, 12). *Sinopsis Film Dirty Vote yang Ungkap Desain Kecurangan Pemilu 2024*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7189195/sinopsis-film-dirty-vote-yang-ungkap-desain-kecurangan-pemilu-2024>
- Foucault, Michel. (2018). *Parrhesia: Berani Berkata Benar*. (ter.) Haryanto Cahyadi. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Hakim, Ikhsan Abdul. (2024, Februari, 13). *Kompilasi Komentar Elite Politik Soal Dokumenter Dirty Vote: dari Apresiasi hingga Tuduhan Fitnah*. Kompas.TV. <https://www.kompas.tv/nasional/484754/kompilasi-komentar-elite-politik-soal-dokumenter-dirty-vote-dari-apresiasi-hingga-tuduhan-fitnah?page=all>
- Popper, Karl. (2002). *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*. (terj.) Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kebung, Konrad. (1997). *Michel Foucault Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Kebung, Konrad. (2017). Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia. *MELINTAS*, 33(1).
- Kebung, Konrad. (2018). Michel Foucault: Parrhesia (Truth-Telling) dan Care of The Self. *DISKURSUS*, 17(1).
- Madung, Otto Gusti. (2021). Demokrasi dan Kebenaran. dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan Herlambang P. Wiratraman (ed.). *Demokrasi Tanpa Demos*. Depok: Penerbit LP3ES.

- Kelly, Mark. (2010). Miche Foucault (1926-1984). dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <https://iep.utm.edu/foucault/>
- Wada, Yoakim Elton Subang. (2019). Parrhesia, Defisit Demokrasi, dan Peran Filosof. *AKADEMIKA*, 13(1).